

Penerimaan negara dari Freeport

diupayakan lebih besar

Sabtu, 22 Desember 2018 08:12 WIB



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin, Jaksa Agung M Prasetyo dan Mensesneg Pratikno memberikan keterangan terkait pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018). Presiden mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia dengan membayarkan 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun melalui PT Inalum sehingga telah resmi menjadi milik Indonesia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama.

untuk komponen PPN, skema yang digunakan juga "nail down" sehingga tidak terpengaruh apabila ada perubahan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berupaya menjamin penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia menjadi lebih besar setelah proses pengalihan saham mayoritas (divestasi) kepada *holding* industri pertambangan PT Inalum (Persero) tuntas.

"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak lebih besar untuk negara, dengan berapapun nilai dari harga tembaga dan emas," kata Sri Mulyani ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jumat (21/12) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keseluruhan komponen penerimaan pajak dan bukan pajak akan menggunakan Pasal 169 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penerimaan negara harus lebih besar.

"Dengan perubahan harga, kalau dijumlahkan seluruh penerimaan kita, baik dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) badan, PPh perseorangan, pajak pertambahan nilai (PPN), PBB, pajak air dan tanah, royalti, itu semuanya akan masuk dalam komponen yang secara total lebih banyak," tambah dia.

Baca juga: [Presiden umumkan pelunasan divestasi PT Freeport](#)

Pemerintah menggunakan sistem pajak *nail down* atau persentase setiap komponen pajak bersifat tetap untuk menghitung penerimaan negara dari tambang PT Freeport Indonesia.

"Komponennya bisa berbeda-beda. Untuk masing-masing komponen di dalam PPh, kami menggunakan PPh yang sekarang. Berarti mereka mendapatkan pajak korporasi 25 persen, itu lebih kecil dari yang di kontrak karya yang 35 persen namun di-*nail down*, jadi kalau ada perubahan UU PPh mereka tetap bayar 25 persen," ujar dia.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa untuk komponen PPN, skema yang digunakan juga *nail down* sehingga tidak terpengaruh apabila ada perubahan.

"Karena ini memberikan kepastian mereka untuk tetap memberikan kewajiban penerimaan. Royalti juga menggunakan yang sekarang ini ditetapkan, sehingga mereka akan membayar sesuai tarif sekarang, kalau nanti ada perubahan tarif royalti, tetap ada *nail down*," kata dia.

Untuk pajak daerah, Sri Mulyani menyebutkan bahwa perda mengenai komponen-komponen pajak daerah sudah akan dikeluarkan.

Ia menjelaskan bahwa skema semacam itu mampu memberikan kepastian dalam hal penerimaan kepada negara.

"Karena kami harus menghitung berdasarkan Pasal 169 UU Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menjamin kita mendapatkan pendapatan lebih tinggi, dan untuk Freeport mereka bisa bekerja dengan kepastian kewajiban apa yang mereka harus bayarkan kepada kita," kata Sri Mulyani.

Baca juga: [Divestasi selesai, kontrak Freeport resmi jadi IUPK](#)

Baca juga: [CEO Freeport targetkan pembangunan smelter selesai dalam lima tahun](#)

Pewartanya: Calvin Basuki

Editor: Royke Sinaga

Divestasi Freeport Selesai,

Said Didu Ingatkan Soal Papa Minta Saham

Reporter: [Caesar Akbar](#)

Editor: [Martha Warta Silaban](#)

Sabtu, 22 Desember 2018 15:15 WIB



Ilustrasi infografis "Asal Mula 'Papa Minta Saham'". (Ilustrasi: KORAN TEMPO)

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Said Didu mengingatkan pemerintah agar mengisolasi PT [Freeport](#) Indonesia dari kepentingan politik pasca rampungnya divestasi saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum. Pasalnya, persoalan perusahaan tambang emas dan tembaga itu rawan kepentingan politik.

BACA: [Usai Divestasi, Komisaris dan Direksi Freeport Indonesia Dirombak](#)

"Bisnis ini adalah bisnis yang sangat besar dan berisiko tinggi. Saya berharap jangan lagi ada benalu atau pihak-pihak yang mau menumpang hidup di Freeport," ujar Didu di D'Consulate, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018.

Ia lantas merujuk kasus 'Papa Minta Saham' yang sempat hangat di kalangan masyarakat pada 2015. Istilah tersebut sempat mencuat saat Setya Novanto yang

waktu itu menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ketahuan mencatat nama Presiden Joko Widodo untuk meminta imbalan saham PT Freeport Indonesia.

Menurut Said, ia sangat memahami duduk persoalan divestasi saham tersebut lantaran sempat ikut berunding. Ia juga sempat ikut membongkar perkara 'Papa Minta Saham' itu ke kalangan publik. Kasus tersebut dinilai sebagai puncak gunung es lantaran banyaknya tokoh yang bermain di PT Freeport.

"Jadi semua tokoh itu harus dibersihkan agar utang yang cukup besar oleh Inalum itu tidak rugi, Freeport itu enggak selalu untung," kata Didu.

Terlepas dari itu, Said Didu menilai proses divestasi itu sebenarnya biasa saja. Peristiwa serupa pernah terjadi saat Indonesia mengambil Inalum dari kepemilikan Jepang, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja negara. "Jadi itu suatu langkah korporasi biasa."

Divestasi itu juga, menurut Didu, mau tidak mau memang kondisinya harus terjadi lantaran beberapa faktor. Misalnya, habisnya kontrak dan Freeport harus memperpanjang sebelum 2021, adanya kewajiban memenuhi Undang-undang Mineral dan Batubara.

Di samping itu, [Freeport](#) ternyata juga sedang mau menjual sahamnya, di saat Freeport memang mau menjual sahamnya. Tak hanya itu, kondisi tersebut juga didukung lantaran Inalum bisa mendapatkan utang untuk membeli dan kebijakan pemerintah yang mendukung. "Jadi lima hal ini sekaligus mendukung," kata dia. "Analisis saya, ini langkah terbaik dari pilihan yang banyak dan ribet."